



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 170 / 14 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

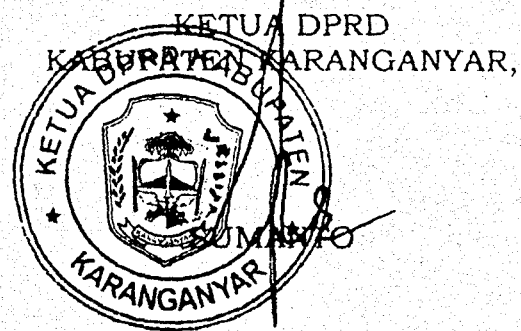
- Menimbang : a. bahwa Pembahasan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 November 2017



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 170/14 TAHUN 2017
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH TAHUN 2018

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2018

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAK- SANA- AN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAM- PAIAN (9)	KETE- RANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penje- lasan/ Kete- rangan			
1.	Peraturan Daerah	Pelestarian Budaya Jawa dan Kearifan Lokal	a. Pengelolaan kebudayaan masyarakat Kabupaten Karanganyar; b. Pelestarian tradisi masyarakat Kabupaten Karanganyar; c. Pembinaan lembaga adat yang ada di Kabupaten Karanganyar.	Baru		2018	NA		DPRD	Oktober 2018	Lampiran huruf V UU No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
									beberapa kali terakhir dengan UU. No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.		
2.	Peraturan Daerah	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten;	Baru		2018	NA		DPRD	Oktober 2018	Lampiran huruf S UU. No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten.						dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.		
3.	Peraturan Daerah	Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga	Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, perkembangan penduduk perlu dikelola dengan terencana baik kuantitas, kualitas, dan mobilitas, meliputi : a. Hak dan kewajiban penduduk; b. Kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;	Baru		2018	NA		1. DP3APPKB; 2. DKK; 3. DISDUKCAPIL 4. INSPEKTORAT; 5. BAG. HUKUM SETDA.	Agustus 2018	1. Lampiran huruf N UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			c. Pengembangan kualitas penduduk; d. Penertiban penduduk; dan e. Transmigrasi; f. Peran dan tanggung jawab keluarga; g. Pembinaan dan pengawasan.						UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. UU. No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
									3. PP. No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga		
4.	Peraturan Daerah	Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah	a. Informasi dan pelaporan kerugian daerah; b. Penyelesaian kerugian daerah; c. Penentuan nilai kerugian daerah; d. Penagihan dan penyetoran;	Baru		2018	NA		1. BKD; 2. INSPEKTORAT; 3. BAG. HUKUM SETDA	Agustus 2018	1. PP. No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<p>e. Penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani urusan piutang daerah;</p> <p>f. Kadaluarsa;</p> <p>g. Pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian dan akuntansi, dan pelaporan keuangan;</p> <p>h. Keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya.</p>						<p>Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.</p> <p>2. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
									tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.		
5.	Peraturan Daerah	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	a. Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; b. Pengawasan dan Pengendalian; c. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; d. Penentuan Lokasi;	Baru		2018	NA		1. DISHUB- PKP 2. DPU-PR; 3. DINSOS; 4. BPN; 5. BAPERLIT- BANG; 6. DLH; 7. SATPOL PP; 8. DPM-PTSP; 9. INSPEKTORAT; 10. BAG. HUKUM SETDA	Agustus 2018	UU. No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			e. Pola-pola Penanganan; f. Penyediaan Tanah; g. Pendanaan dan Sistem Pembiayaan; h. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah; i. Peran Kemitraan, Peran Masyarakat, dan Kearifan Lokal; j. Persyaratan dan Larangan Pembangunan Rumah, Perumahan, dan Permukiman.						
6.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jema'ah Haji	a. Penyelenggaraan ibadah haji daerah; b. Transportasi dan biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan; c. Petugas haji daerah.	Baru	2018	NA	1. KEMENAG.; 2. INSPEKTORAT; 3. BAG. KESRA SETDA; 4. BAG. HUKUM SETDA.	Agustus 2018	1. UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 34 Tahun 2009 tentang Penetapan PP. Pengganti UU. No. 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU. No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
									2. PP. No. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU. No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.	
7.	Peraturan Daerah	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Kebakaran	a. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; c. Investigasi kejadian kebakaran;	Baru		2018		1. SATPOL PP; 2. DISHUB- PKP; 3. BPBD; 4. INSPEKTO- RAT; 5. BAG. HUKUM SETDA.	Agustus 2018	UU. No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; e. Edukasi masyarakat.							
8.	Peraturan Daerah	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	a. Penyediaan Prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang bereksplorasi, berpromosi, dan berinteraksi; b. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat desa.	Baru .	2018	NA		1. DISPARPO-RA; 2. DISNAKER-DAGKOP DAN UKM; 3. DISHUB-PKP; 4. DPU-PR; 5. SATPOL PP; 6. INSPEKTORAT; 7. BAG. HUKUM SETDA.	Agustus 2018	UU. No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata-an.
9.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Pertanian Daerah	a. Pengembangan prasarana pertanian;	Baru	2018	NA		1. DISPERTAN 2. DPU-PR; 3. BAPERLIT-BANG		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			b. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.				4. BPBD; 5. DPMPTSP; 6. INSPEKTORAT; 7. BAG. HUKUM SETDA.	Agustus 2018	1. Lampiran huruf AA UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015 Perubahan Kedua atas UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									2. Permen- tan No. 43/Perm entan/O T.010/8/ 2016 tentang Pedoman Nomen- klatur, Tugas, dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kab./ Kota
10.	Peraturan Daerah	Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan	a. Penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas	Baru		2018		Agustus 2018	Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3) UU No. 22 Tahun

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<ul style="list-style-type: none"> b. Penyediaan perlengkapan jalan; c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C; d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir; e. Pengujian berkala kendaraan bermotor; f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan; g. Persetujuan hasil AMDAL-LALIN untuk jalan; h. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah; i. Penetapan kawasan perkotaan 						<p>2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<p>dalam 1 daerah;</p> <p>j. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 daerah;</p> <p>k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan 1 daerah;</p> <p>l. Penetapan wilayah Operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah Operasinya berada dalam daerah;</p> <p>m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 daerah;</p>						

1	2		3	5	6	7	8	9	10
			<p>n. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah Operasinya berada dalam daerah;</p> <p>o. Penetapan 19ariff kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah, serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah Pelayanannya dalam daerah.</p>						
11.	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011	<p>a. Perubahan luasan dan lokasi tempat pemakaman bukan umum;</p> <p>b. Penetapan tempat pemakaman umum</p>	Ubah	2018	Penjelasan	<p>1. DISHUB- PKP;</p> <p>2. BKD;</p> <p>3. INSPEKTO- RAT;</p> <p>4. BAG. HUKUM SETDA</p>	Agustus 2018	UU. No. 28 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1	2	3	5	6	7	8	9	10	
		tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	bagi makam pada Kelurahan; c. Penetapan tempat pemakaman umum bagi tanah dari pengembang; d. Perubahan obyek dan besaran retribusi makam.						
12.	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan	a. Materi persampahan dan kebersihan daerah; b. Penunjukan dan penetapan TPS; c. Perubahan retribusi kebersihan.	Ubah	2018	Penjelasan	1. DLH; 2. BKD; 3. INSPEKTORAT; 4. BAG. HUKUM SETDA	Agustus 2018	1. UU. No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. UU. No. 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah

1	2		3	5	6	7	8	9	10
									3.UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlin- dungan dan Pengelola-an Lingkung-an Hidup; 4.PP. No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelola-an Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 5.PP. No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan/ Keterangan			
1.	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;	Baru		2018		Penjelasan	BADAN KEUANGAN DAERAH	Oktober 2018	1. Rutin; 2. Pasal 239 ayat (5) UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dgn UU No. 9 Tahun
			b. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;	Baru		2018		Penjelasan		Maret 2018	
			c. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018		Ubah	2018		Penjelasan		Juni 2018	

1	2		3	5	6	7	8	9	10
									<p>2015 Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerin- tahan</p>
2.	Peraturan Daerah	Akibat Putusan Mahkamah Agung	Rancangan yang harus disesuaikan guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung						<p>Pasal 239 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerin- tahan Daerah sebagaima- na telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9</p>

1	2	3	5	6	7	8	9	10
								Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerin- tahan .Daerah.

KETUA DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR,
SUMANTO

